



**PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat yang Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020 -2024.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide, tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak



ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 199803 2 004 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan sasaran Renja	40
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	52
BAB V PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL II.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA	11
TABEL II.2	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA	17
TABEL II.3	TARGET DAN INDIKATOR KINERJA.....	25
TABEL II.4	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN	26
TABEL II.5	PAGU ANGGARAN DAN BELANJA	28
TABEL II.6	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	34
TABEL III.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	47
TABEL IV.1	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)..
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 nomor 1447)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E).
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 19);
18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
20. Peraturan Walikota Nomor tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
22. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 18.1/DISDUKCAPIL/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024
23. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 04.1/DISDUKCAPIL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak nomor 01.01/Disdukcakil/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tahun 2021 telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2021. Adapun sasaran yang ditetapkan berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian kinerjanya dijelaskan berikut ini.

A. Program dan Kegiatan

Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan :

Program Umum

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pembangunan

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

a. Penyusunan Profil Kependudukan

- Kerjasama Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2.12.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	32	Dokumen		8	Dokumen	8	100,00			
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	20	Dokumen		5	Dokumen	5	100,00			
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	sub kegiatan		39	sub kegiatan	39	100,00			
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	24	Laporan		6	Laporan	6	100,00			
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	Laporan		3	Laporan	3	100,00			
2.12.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16	Laporan		4	Laporan	4	100,00			
2.12.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	240	ASN		60	ASN	55	91,67			
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	480	Stel		120	Stel	113	94,17			
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	20	Orang		1	Orang	1	100,00			
2.12.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	400	Unit		37768	Unit	37768	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebstra (%)				
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERA	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124	Unit		42	Unit	42	100,00			
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	Unit		1	Unit	1	100,00			
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	120	Unit		41	Unit	41	100,00			
2.12.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	132	Unit		33	Unit	33	100,00			
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12	Unit		3	Unit	3	100,00			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120	Unit		30	Unit	30	100,00			
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga										
2.12.02.2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100	%		100	%	94,28	94,28			
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	960	Orang		240	Orang	140	58,33			
		Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	400	Orang		100	Orang	613	613,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target	Uraian		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	16000	Orang		4000	Orang	1140	28,50			
		Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	14000	NIK		3500	NIK	12919	369,11			
		Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	8	Kali		2	Kali	1	50,00			
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					12280	NIK	8270	67,35			
2.12.02.2.02	PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100	%		100	%	100	100,00			
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko Ktp-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah waktu penyediaan bahan untuk penerbitan dokumen kependudukan	48	Bulan		1	Bulan	1	100,00			
2.12.02.2.03	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%		100	%	100	100,00			
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	192	Kali		6	Kali	6	100,00			
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran										
02.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%		100	%	100	100,00			
02.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil	28000	NIK		7000	NIK	7000	100,00			
		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital	60000	Dokumen		15000	Dokumen	15000	100,00			
		Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi	4000	Dokumen		1000	Dokumen	1000	100,00			
02.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		4400	Dokumen		1100	Dokumen	2558	232,55			
2.12.03.2.02	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100	%		100	%	100	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	24	Kali		0	Kali	0	#DIV/0!		
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah koordinasi yang dilakukan	24	Kali		6	Kali	6	100,00		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang dihasilkan (paket)	192	Kali		6	Kali	6	100,00		
2.12.03.2.03	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100	%		100	%	100	100,00		
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengemai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	4800	Dokumen		1200	Dokumen	1200	100,00		
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat RT dan kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis administrasi kependudukan	1392	Orang		0	Orang	0	#DIV/0!		
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH									
2.12.04.2.01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	100	%		100	%	87,17	87,17		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	29	PD		2	PD	3	150,00		
		Jumlah NIK yang dilakukan update data pendidikannya	116000	NIK		22000	NIK	19177	87,17		
02.12.04.2.03	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	100	%		100	%	100	100,00		
02.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK	144	Kali		36	Kali	36	100,00		
02.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan										
2.12.05.2.01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100	%		100	%	100	100,00			
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan	140	Buku		35	Buku	35	100,00			
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan	260	Buku		65	Buku	65	100,00			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator 1 : Persentase Keluarga yang Memiliki KK
- Indikator 2 : Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- Indikator 3 : Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA
- Indikator 4 : Persentase penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- Indikator 5 : Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- Indikator 6 : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- Indikator 7 : Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai
- Indikator 8 : Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status

- Indikator 9 : Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- Indikator 10 : Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
- Indikator 11 : Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- Indikator 12 : Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Indikator Kinerja

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	95,50	98,02	102,64
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	90,50	99,40	109,83
			Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA	22,50	33,20	147,56
			Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97,50	97,56	100,06
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	92,50	96,42	104,24
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	52,50	61,00	116,19
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	32,50	74,65	229,69
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	32,50	22,80	70,15
			Persentase Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian	32,50	98,22	302,22
		Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	57,50	66,67	115,95
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
		Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

A. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Keluarga yang memiliki KK adalah Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga.

Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 102,64%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

B. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 109,83 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan dengan baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

C. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat

dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada tahun 2021, persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA tercatat memiliki capaian sebesar 147.56%. Dari target nasional sebesar 22,50%, Dinas Kependudukan Kota Pontianak telah mencapai target nasional.

D. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah tetap, biasanya dilakukan untuk oleh mahasiswa yang sednag belajar di tempat tertentu, dan penduduk yang bekerja.

Setiap penduduk non permanen wajib memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dulu disebut dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di wilayah setempat.

Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi. Setiap penduduk non permanen wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk non permanen wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu 2 x 24 jam sejak kepindahannya kepada kelurahan setempat melalui RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.

Indikator persentase penduduk non permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen di rumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dibagi jumlah pemohon penduduk non permanen. Untuk tahun 2021, realisasi pencapaiannya adalah 97,56%.

E. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun

Tahun 2021, persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang mencapai 96,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

F. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.

Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yangn memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Untuk tahun 2021, Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan mencapai 61,00%.

G. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan dan tidak tercatat, Pada tahun 2021 untuk realisasi kinerja adalah 74.65% dari target sebesar 32.50%.

H. Persentase anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status

Pengajuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antar ayah kandung dengan ibu kandung.

Sedangkan pengesahan anak merupakan pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, diluar ikatan perkawinan yang sah, diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status dirumuskan yaitu jumlah anak yang mengalami perubahan status dibagi jumlah anak yang berstatus anak seorang ibu. Untuk Tahun 2021 capaiannya adalah sebesar 70,15%.

I. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian.

Tahun 2021, Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian terealisasi sebesar 98.22%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang

meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

J. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data

Pemanfaatan data kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan dan atau penegakan hukum.

Proses pemberian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Ijin sebagaimana dimaksud sebagai syarat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna.

Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data di rumuskan yaitu jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data dibagi jumlah instansi pelayan publik di Kota Pontianak. Untuk Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 21 Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dan artinya jumlah capainya adalah sebesar 115.95%

K. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk Kepentingan Pembangunan

Tingkat keakurasian data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan khususnya dari kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akurat dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akurat merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua

keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pambangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan berskala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan dibagi jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk tahun 2021 telah dicapai.

Untuk target indikator pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	96.00
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91.00
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	25.00
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.00
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	93.00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55.00
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	35.00
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35.00
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	35.00
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60.00
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100.00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik

Analisis kinerja pelayanan dari tahun (n-2) , tahun(n-1), tahun n, tahun (n+1) dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (nh-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK			95,00	95,50	96,00	96,50	96,00		96,00	96,50	
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP		Perekaman KTP Elektronik	90,00	90,50	91,00	91,50	96,11		91,00	91,50	
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	20,00	22,50	25,00	27,50	22,11		25,00	27,50	
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen			97,00	97,50	98,00	98,50	96,60		98,00	98,50	
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran		Kepemilikan Akta Kelahiran	92,00	92,50	93,00	93,50	98,01		93,00	93,50	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan		Penerbitan Akta Perkawinan	50,00	52,50	55,00	57,50	63,05		55,00	57,50	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai		Penerbitan Akta Perceraian	30,00	32,50	35,00	37,50	81,43		35,00	37,50	
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status			30,00	32,50	35,00	37,50	22,43		35,00	37,50	
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian		Penerbitan Akta Kematian	30,00	32,50	35,00	37,50	32,61		35,00	37,50	
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	55,00	57,50	60,00	62,5	41,38		60,00	62,5	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (nh-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pontianak Tahun 2021.

APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2021 sebesar Rp.12.325.003.694,- untuk Belanja terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Rp. 6.942.708.326,-

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 378.935.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.854.671.206,-

- Belanja Modal Rp 1.148.689.162,-

Rp. 5.382.295.368,-

Total Belanja Rp. 12.325.003.694,-

Adapun rincian Belanja Tahun 2021 per Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
I.	2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.584.783	152.633.100	99,38
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.659.045	8.657.800	99,99
2	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.976.338	4.975.900	99,99
3	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.199.500	17.199.500	100,00
4	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.749.900	121.799.900	99,23
II.	2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.278.743.226	6.911.318.964	94,95
5	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.942.708.326	6.576.794.064	94,73

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
6	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	333.585.000	332.225.000	99,59
7	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.449.900	2.299.900	93,88
III.	2.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.079.937	120.060.000	98,35
8	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.430.000	86.430.000	100,00
9	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	100,00
10	2.12.01.2.05.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30.649.937	28.630.000	93,41
35	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	#DIV/0!
Ik	2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.574.285.813	1.523.579.196	96,78
10	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.888	9.997.800	99,98
11	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.395.940.091	1.349.107.520	96,65
12	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.075.000	36.896.000	99,52
13	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.774	29.827.500	99,43
14	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.720.000	9.665.000	99,43
15	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.551.060	88.085.376	96,21
V.	2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.167.149.262	1.104.817.274	94,66
16	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	713.200.100	663.568.694	93,04
17	2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	453.949.162	441.248.580	97,20
VI.	2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.300.452.102	1.283.090.321	98,66
18	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.901.980	27.061.650	67,82
19	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.000	23.380.995	93,53
20	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	#DIV/0!
21	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.551.122	1.232.647.676	99,77
VII.	2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.993.600	64.979.700	99,98
22	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.313.600	40.308.200	99,99
23	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.680.000	24.671.500	99,97
VIII.	2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	73.149.000	70.758.000	96,73
24	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	42.449.500	42.449.500	100,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
25	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	28.699.500	26.309.500	91,67
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.000.000	1.999.000	99,95
IX.	2.12.02.2.02.	Penataan Pendaftaran Penduduk	6.607.000	6.607.000	100,00
26	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	6.607.000	6.607.000	100,00
X.	2.12.02.2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	38.500.000	38.500.000	100,00
27	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	38.500.000	38.500.000	100,00
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	#DIV/0!
XI.	2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	215.445.518	214.248.400	99,44
29	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.650.618	25.650.300	100,00
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	189.794.900	188.598.100	99,37
XII.	2.12.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.400.000	37.899.800	93,81
31	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	#DIV/0!
32	2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	37.900.000	35.400.000	93,40
33	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2.500.000	2.499.800	99,99
XIII.	2.12.03.2.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	58.750.000	58.750.000	100,00
34	2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	58.750.000	58.750.000	100,00
	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	#DIV/0!
XIV.	2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	103.885.480	103.725.000	99,85

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
36	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	103.885.480	103.725.000	99,85
XV.	2.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.555.040	108.255.369	95,33
37	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	77.715.000	95,47
38	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	#DIV/0!
39	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	32.150.100	30.540.369	94,99
XVI.	2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	13.422.933	12.422.933	92,55
40	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.853.783	2.853.783	100,00
41	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	10.569.150	9.569.150	90,54
		JUMLAH	12.325.003.694	11.811.645.057	95,83

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Bidang Pelayanan Kependudukan

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan.
3. Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el.
4. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
5. Kurangnya sarana dan petugas dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

2.3.2 Permasalahan Bidang Pencatatan Sipil

1. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
2. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.

4. Masih belum sepenuhnya pengarsipan dan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil.
5. Masih banyak peristiwa perkawinan yang belum dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

2.3.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan

1. Tenaga/staf yang menangani TI masih kurang jika dibandingkan dengan tanggung jawab untuk menangani TI di internal, kecamatan, dan lintas Perangkat Daerah.
2. Kaderisasi Administrator Database belum berjalan dan memperhatikan tantangan administrasi kependudukan maka perlu pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk Administrator Database yang baru.
3. Tenaga/staf masih terfokus ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga untuk menangani pengembangan sistem yang lain tidak diperhatikan. Dampak lanjutannya, masing-masing staf dari masing-masing seksi tidak memahami tupoksinya secara utuh.
4. Sulit untuk melakukan eksplorasi lebih dalam untuk pengembangan di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, karena staf lebih banyak difungsikan untuk melayani rutinitas layanan kepada warga.
5. Jaringan komunikasi data masih perlu dioptimalkan dalam topologi dan penataannya, baik itu dalam internal Dukcapil maupun dari Dukcapil ke luar.
6. Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis, yang menyebabkan keharusan untuk mengimplementasikan hal tersebut tidak dapat terealisasi tepat waktu.

7. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kondisi perangkat keras/jaringan harus selalu menyesuaikan dengan hal tersebut, agar dapat optimal dalam melakukan pelayanan.
8. Tidak ada pengembangan dalam pengolahan data dan hanya terfokus ke penyusunan profil perkembangan kependudukan dan verifikasi anomali data. Sementara data hal lain belum dapat dilakukan seperti analisis dampak kependudukan, penyusunan indikator kependudukan, dan penyusunan tipologi kependudukan.
9. Perlunya pengembangan kapasitas pembelajaran lebih lanjut dalam menganalisis permasalahan pengolahan data.
10. Masih ditemukannya anomali data kependudukan yang membutuhkan penyelesaian secara terstruktur dan efektif.
11. Masih perlunya pemahaman pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga/Perangkat Daerah.
12. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan komunikasi ke Pusat terhadap pemanfaatan data.
13. Kemitraan strategis di tingkat daerah masih perlu dioptimalkan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program yang mendukung Rencana Kerja 2022 dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	10.273.518.405,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	10.273.518.405,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	30.394.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	30.394.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	8.000.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	8.000.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	38 Sub Kegiatan	1.194.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	38 Sub Kegiatan	1.194.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Laporan	17.599.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Laporan	17.599.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3.600.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3.600.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	6.778.909.105,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	6.778.909.105,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.490.270.305,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.490.270.305,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	285.840.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	285.840.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	4 Laporan	2.798.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	4 Laporan	2.798.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	60 ASN	46.420.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	60 ASN	46.420.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	110 Stel	36.420.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	110 Stel	36.420.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 Orang	10.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 Orang	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.468.100.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.468.100.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.979.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.979.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1500 Unit	1.317.259.020,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1500 Unit	1.317.259.020,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	33.100.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	33.100.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	22.044.600,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	22.044.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	76.217.180,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	76.217.180,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	377.124.100,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	377.124.100,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	377.124.100,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	377.124.100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	1.460.941.300,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	1.460.941.300,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	28.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	28.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	32.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	32.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.400.941.300,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.400.941.300,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 Unit	111.628.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 Unit	111.628.800,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3 Unit	76.650.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3 Unit	76.650.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	34.978.800,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	34.978.800,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pontianak				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pontianak				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pontianak				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pontianak				
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pontianak	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88,50 %	82.274.700,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pontianak	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88,50 %	82.274.700,00	
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80,50 %				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80,50 %		
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85,50 %				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85,50 %		
			Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97,50 %				Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97,50 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase penerbitan dokumen KTP EL, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100,0 %				Persentase penerbitan dokumen KTP EL, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100,0 %		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	48.149.700,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	48.149.700,00	
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	1) Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	240 Orang	23.349.900,00	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	1) Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	240 Orang	23.349.900,00	
			2) Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	100 Orang				2) Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	100 Orang		
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	1) Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	4000 Orang	21.799.800,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	1) Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	4000 Orang	21.799.800,00	
			2) Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)	3500 NIK				2) Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)	3500 NIK		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	2 Kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	2 Kali		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (NIK)	12880 NIK	3.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (NIK)	12880 NIK	3.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	34.125.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	34.125.000,00	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan	12 Bulan	34.125.000,00	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan	12 Bulan	34.125.000,00	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pontianak	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	95,50 %	82.829.500,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pontianak	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	95,50 %	82.829.500,00	
			Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32,50 %				Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32,50 %		
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32,50 %				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32,50 %		
			Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32,50 %				Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32,50 %		
			Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100,0 %				Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100,0 %		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 Orang	31.449.700,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 Orang	31.449.700,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	1) Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)	7000 NIK	26.349.700,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	1) Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)	7000 NIK	26.349.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2) Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital (dokumen)	15000 Dokumen				2) Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital (dokumen)	15000 Dokumen		
			3) Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi (dokumen)	1000 Dokumen				3) Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi (dokumen)	1000 Dokumen		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu (dokumen)	1100 Dokumen	5.100.000,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu (dokumen)	1100 Dokumen	5.100.000,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	38.559.900,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	38.559.900,00	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	6 Kali	14.559.900,00	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	6 Kali	14.559.900,00	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	12 Bulan	24.000.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	12 Bulan	24.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	12.819.900,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	12.819.900,00	
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	1200 Dokumen	12.819.900,00	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	1200 Dokumen	12.819.900,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %	190.558.520,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %	190.558.520,00	
			Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %				Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %		
			Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling	100 %				Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling	100 %		
			Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	52,5 %				Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	52,5 %		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pontianak	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	79.613.880,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pontianak	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	79.613.880,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	1) Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	13 PD	79.613.880,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	1) Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	13 PD	79.613.880,00	
			2) Jumlah NIK yang dilakukan update data pendidikannya	29000 NIK				2) Jumlah NIK yang dilakukan update data pendidikannya	29000 NIK		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	110.944.640,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	110.944.640,00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK (kali)	36 Kali	81.404.940,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK (kali)	36 Kali	81.404.940,00	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	1) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website (kali)	12 Bulan	29.539.700,00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	1) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website (kali)	12 Bulan	29.539.700,00	
			2) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet (kali)	12 Bulan				2) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet (kali)	12 Bulan		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	20.038.300,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	20.038.300,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Pontianak	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %	20.038.300,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Pontianak	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %	20.038.300,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan (Buku)	35 Buku	3.041.800,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan (Buku)	35 Buku	3.041.800,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusunan profil kependudukan (buku)	65 Buku	16.996.500,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusunan profil kependudukan (buku)	65 Buku	16.996.500,00	
					10.649.219.425,00					10.649.219.425,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik
4. Bidang Pencatatan Sipil “Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sinergi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota Pontianak yang mempunyai Visi pada RPJMD : *“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat* dan Misi 3: *“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”*.

Pernyataan visi dapat diuraikan sebagai berikut:

■ Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

■ Cerdas

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup Perangkat Daerah dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

■ Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas danberbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Misi 3 yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang**

didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Misi : “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”

Tujuan : “Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria

SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan
- b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
- c. Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
- d. Meningkatnya Ketersediaan *Database* Kependudukan berskala Kota
- e. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

- Persentase Keluarga yang memiliki KK
- Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- Persentase anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki KIA
- Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai
- Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

- Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
- Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menetapkan kebijakan dan program untuk tahun 2020-2024. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2020-2024 adalah:

Tujuan

Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pendaftaran Kependudukan
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kebijakan

1. Melakukan pelayanan pembuatan KTP elektronik ditempat-tempat tertentu
2. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (kali)
3. Melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)
4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan
5. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen
6. Melakukan penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu
7. Melakukan Pendataan data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)
8. Melakukan digitalisasi dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital
9. Melakukan sinkronisasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian dengan data SIAK

10. Melakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen register akta pencatatan sipil (dokumen)
11. Melakukan bimbingan teknis administrasi pencatatan sipil terhadap perangkat RT dan Kelurahan
12. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data Warehouse
13. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website
14. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK
15. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan data pada sistem intranet serta penyampain informasi melalui SMS gateway
16. Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali lainnya
17. Menyusun profil kependudukan berdasarkan informasi kependudukan
18. Melakukan pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain
19. Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	12	bulan	9.979.600,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	10.400.000,00
2	12	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pontianak	1500	unit	1.317.259.020,00	Dana Transfer Umum-DAU		1.500	118.830.400,00
2	12	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Pontianak	12	bulan	33.100.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	47.736.000,00
2	12	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	12	bulan	22.044.600,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	31.200.000,00
2	12	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	12	bulan	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	9.880.000,00
2	12	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Pontianak	12	bulan	76.217.180,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	271.568.000,00
2	12	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	30	unit	377.124.100,00			31	563.921.200,00
2	12	01	2,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	30	unit	377.124.100,00	Dana Transfer Umum-DAU		30	563.921.200,00
2	12	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pontianak	12	bulan	1.460.941.300,00			12	584.368.512,00
2	12	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Pontianak	12	bulan	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	17.160.000,00
2	12	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Pontianak	12	bulan	32.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	33.280.000,00
2	12	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pontianak	12	bulan	1.400.941.300,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	533.928.512,00
2	12	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pontianak	33	unit	111.628.800,00			33	81.891.680,00
2	12	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Pontianak	3	unit	76.650.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		3	45.907.680,00
2	12	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pontianak	30	unit	34.978.800,00	Dana Transfer Umum-DAU		30	35.984.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pontianak							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Pontianak							
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Pontianak	88,50	%	82.274.700,00			89,50	377.239.760,00
						Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP		80,50	%				81,50	
						Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA		85,50	%				86,50	
						Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen		97,50	%				98,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				(4)	(5)						(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
		Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling		100,00	%			100,00						
2	12	02	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	100	%	48.149.700,00			100	114.739.760,00
2	12	02	2	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1) Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	Pontianak	240	orang	23.349.900,00	Dana Transfer Umum-DAU		240	57.511.480,00
						2) Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan		100	orang				100	
2	12	02	2	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di tempat-tempat tertentu	Pontianak	4000	orang	21.799.800,00	Dana Transfer Umum-DAU		4.000	52.228.280,00
						2) Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)		3500	NIK				3.500	
2	12	02	2	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (NIK)	Pontianak	12880	NIK	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		2	5.000.000,00
2	12	02	2		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	100%		34.125.000,00			100	262.500.000,00
2	12	02	2	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pontianak	12	bulan	34.125.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		12	262.500.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	Pontianak	95,50	%	82.829.500,00			47,50	462.109.896,00
						Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan		32,50	%				32,50	
						Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan		32,50	%				32,50	
						Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akte Kematian tepat waktu pelaporan		32,50	%				32,50	
						Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling		100,00	%				100,00	
2	12	03	2		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	Pontianak	4000	orang	31.449.700,00			100	266.109.896,00
2	12	03	2	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1) Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)	Pontianak	7000	NIK	26.349.700,00	Dana Transfer Umum-DAU		7.000	30.472.000,00
						2) Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital (dokumen)		15000	dokumen				15.000	
						3) Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi (dokumen)		1000	dokumen				1.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	12	3	2	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu (dokumen)	Pontianak	1100	dokumen	5.100.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	1.100	235.637.896,00
2	12	03	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	100	%	38.559.900,00		100	120.496.000,00
2	12	03	2	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi yang di lakukan	Pontianak	6	kali	14.559.900,00	Dana Transfer Umum-DAU	6	44.096.000,00
2	12	03	2	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah waktu Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Pontianak	12	bulan	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	12	76.400.000,00
2	12	03	2		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pontianak	100	%	12.819.900,00		100	75.504.000,00
2	12	03	2	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	Pontianak	1200	dokumen	12.819.900,00	Dana Transfer Umum-DAU	1.200	75.504.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	Pontianak	77,5	%	190.558.520,00		82,5	282.713.184,00
						Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK		30	%				
						Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling		100	%				
						Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan		52,5	%				
2	12	04	2		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pontianak	100	%	79.613.880,00		100	120.026.192,00
2	12	04	2	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1) Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Pontianak	13	PD	79.613.880,00	Dana Transfer Umum-DAU	13	120.026.192,00
						2) Jumlah NIK yang dilakukan update data pendidikannya		29000	NIK			29.000	
2	12	04	2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	100	%	110.944.640,00		100	162.686.992,00
2	12	04	2	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK (kali)	Pontianak	36	kali	81.404.940,00	Dana Transfer Umum-DAU	36	104.197.600,00
2	12	04	2	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website (kali)	Pontianak	12	bulan	29.539.700,00	Dana Transfer Umum-DAU	12	58.489.392,00
						2) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet (kali)		12	bulan			12	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Pontianak	100	%	20.038.300,00			100	19.942.000,00
2	12	5	2		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	Pontianak	100	%	20.038.300,00			100	19.942.000,00
2	12	05	2	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan (Buku)	Pontianak	35	buku	3.041.800,00	APBD		35	3.016.000,00
2	12	05	2	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan (buku)	Pontianak	65	buku	16.996.500,00	APBD		65	16.926.000,00
										10.649.219.425,00				11.158.646.800,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam menopang misi dari pemerintah daerah yaitu *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas* dengan menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kota Pontianak dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan ditahun 2022, berikut kami sajikan tabel IV.1 terkait dengan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								11,215,62 3,342	10,649,21 9,425			11,200,74 6,000				
2	1 2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,630,31 2,422	10,273,51 8,405			10,058,74 1,160				
2	1 2	0 1	02. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30,394,70 0	30,394,70 0			16,218,28 0				
2	1 2	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotkaya	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8,000,100	8,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,239,480
2	1 2	1	02. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	38 sub kegiatan	38 sub kegiatan	8 dokumen	8 dokumen	1,194,800	1,194,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,242,800
2	1 2	1	02. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotkaya	100 %	100 %	6 laporan	6 laporan	8 dokumen	8 dokumen	17,599,80 0	17,599,80 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	4,992,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100%	100%	3 laporan	3 laporan	8 dokumen	8 dokumen	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	3,744,000							
2.1.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,011,760,142	6,778,909,105			8,071,265,488									
2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6,723,121,342	6,490,270,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	7,579,000,000							
2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	285,840,000	285,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	489,354,528							
2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100%	100%	4 laporan	4 laporan	12 bulan	12 bulan	2,798,800	2,798,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	2,910,960							
2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											46,420,000	46,420,000			209,362,400									
2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100%	100%	55 stel	55 stel	60 ASN	60 ASN	36,420,000	36,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	80,662,400							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	3 orang	3 orang	60 ASN	60 ASN	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	31,200,000			
2	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah waktu penyediaan media informasi (leaflet, banner, stiker)	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali	12 kali	60 ASN	60 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	33,500,000			
2	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah perangkat RT dan kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis administrasi kependudukan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	348 orang	348 orang	60 ASN	60 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	64,000,000			
2	1	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,561,893,380	1,468,100,400				489,614,400				
2	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9,979,600	9,979,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	10,400,000			
2	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	1500 unit	2300 unit	12 bulan	12 bulan	1,411,052,000	1,317,259,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	118,830,400			
2	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	33,100,000	33,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	47,736,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	1	02.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	22,044,600	22,044,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	31,200,000			
2	1	1	02.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9,500,000	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	9,880,000			
2	1	1	02.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	76,217,180	76,217,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	271,568,000			
2	1	0	02.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										407,274,100	377,124,100				563,921,200				
2	1	1	02.	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	100 %	100 %	30 unit	43 unit	31 unit	43 unit	407,274,100	377,124,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	563,921,200			
2	1	0	02.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,460,941,300	1,460,941,300				626,467,712				
2	1	1	02.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	28,000,000	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	17,160,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	32,000,000	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	33,280,000		
2	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,400,941,300	1,400,941,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	533,928,512		
2	1	0	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										111,628,800	111,628,800				81,891,680			
2	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	3 unit	3 unit	33 unit	33 unit	76,650,000	76,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	45,907,680		
2	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	30 unit	30 unit	33 unit	33 unit	34,978,800	34,978,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	35,984,000		
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										86,144,700	82,274,700				377,239,760			
2	1	0	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										52,019,700	48,149,700				114,739,760			
2	1	2	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen KTP EL, KK, KIA, pada pelayanan keliling	Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotaya	100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	27,219,900	23,349,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan dokumen KTP EL, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %	57,511,480		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu			89 %	89 %	240 orang	240 orang						Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA				86 %	86 %								Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP				81 %	81 %								Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %		
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen				98 %	98 %								Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	98 %		
2	1 2	2	02. 01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotok aya	100 %	100 %	3500 NIK	3500 NIK	100 %	100 %	Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA ,pada pelayanan keliling	100 %	52.228,280
					Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di tempat-tempat tertentu				89 %	89 %	4000 Orang	4000 Orang		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89 %		
					Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA					86 %	86 %				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %		
					Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP					81 %	81 %				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81 %		
														21.799,800	21.799,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	12	4	02.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotokaya	30 %	30 %	36 Kali	36 Kali	100 %	100 %	81,404,940	81,404,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %	104,197,600
						Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH				77,5 %	77,5 %								Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %	
2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotokaya	30 %	30 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	41,539,700	29,539,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %	58,489,392
						Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet			77,5 %	77,5 %	12 Bulan	12 Bulan						Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77,5 %	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										20,038,300	20,038,300				19,942,000	
2	12	005	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan										20,038,300	20,038,300				19,942,000	
2	12	5	02.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritotokaya	100 %	100 %	35 Buku	35 Buku	100 %	100 %	3,041,800	3,041,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	3,016,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/Pag u Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Tar get	
						Sebel um	Sesu dah	Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h										
2	1 2	5	02. 01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	Kota Pontian ak, Pontian ak Selatan, Pariatok aya	100 %	100 %	65 Buku	65 Buku	100 %	100 %	16,996,50 0	16,996,50 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusuna n Profil Kependudu kan	100 %	16,926,00 0
TOTAL															11,215,62 3,342	10,649,21 9,425		11,200,74 6,000			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja khususnya *outcomes* dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (*outcomes*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP el) tahun 2012 yang telah terlaksana dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 akan melaksanakan 5 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el dan dokumen pencatatan sipil di Kota Pontianak yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik

kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran 2022 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatnya tertib administrasi Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standart nasional; kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Data Base Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.